



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 / 351 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sukoharjo
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500.05/250/2014 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahann Lembaran Negara Republik Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

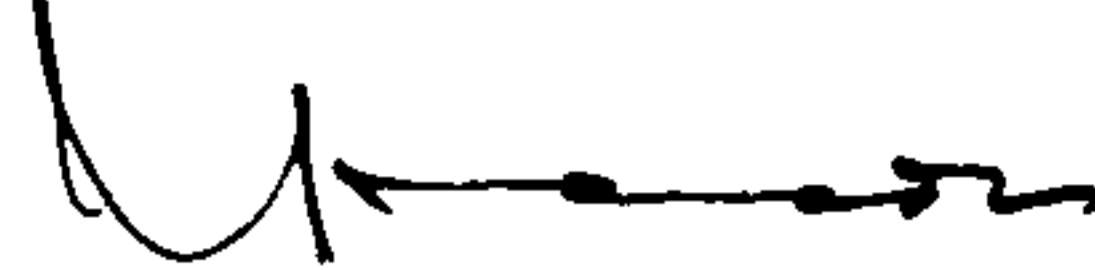
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian Tugas, Mekanisme Kerja dan Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Guna membantu kelancaran tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat yang terdiri dari instansi terkait.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sumber lainnya yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500.05/250/2014 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017.

BUPATI SUKOHARJO, ♀



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Pemimpin Bank Indonesia di Solo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang Bersangkutan
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan arahan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Pemimpin Bank Indonesia Solo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tuga Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan
6	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Satuan Inteljen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnnya
16.	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

9

17.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19	Kepala Sub Bagian Pengembangam Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20	Hendri Suseno SE, NIP. 197605192008011006 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21	Abdul Sarif SE, NIP. 197404142006041008 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Surati SE, NIP. 197812061998032001 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Heru Triasmoro, NIP. 196604061990031012 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Rohmat Joko Utomo, NIP. 196504161993031005 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, &



WARDOYO WIJAYA

9

B. Mekanisme Kerja

Mekanisme Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah

1. dalam melakukan tugasnya, TPID mengadakan pertemuan yang terdiri dari pemantauan rutin setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu;
2. agenda pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengumpulan informasi perkembangan harga dan informasi lainnya serta permasalahan yang ada dan pembahasan alternatif solusi dan atau penyusunan rekomendasi;
3. peserta pertemuan terdiri dari anggota Tim yang dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pejabat/staf terkait yang ditunjuk serta dapat dihadiri oleh pihak lain apabila diperlukan;
4. pertemuan dilaksanakan di Kantor sekretariat atau instansi anggota TPID, berdasarkan kesepakatan bersama;
5. pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim yang didampingi oleh pihak yang bertindak sebagai tuan rumah tempat pertemuan;
6. keputusan Tim Pengendalian Inflasi Daerah diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
7. hasil pembahasan pertemuan TPID dituangkan dalam Risalah pertemuan TPID; dan
8. apabila diperlukan, dapat dilaksanakan pertemuan insidentil untuk membahas isu terkini terkait pengembangan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

C. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga TPID dilakukan oleh semua anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi meliputi :

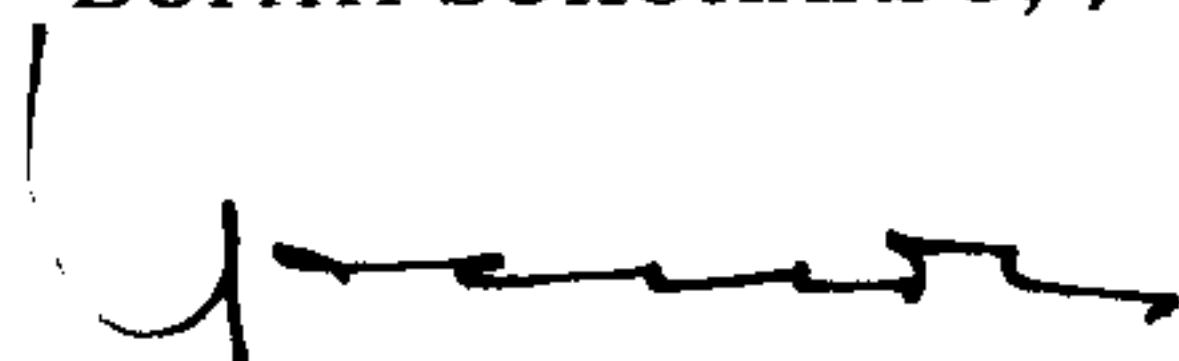
1. pemantauan dan koordinasi perkembangan harga dan kebijakan pengendalian harga;
2. pemberian informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik;
3. pemetaan masalah dilakukan oleh TPID;
4. pengendalian harga komoditas strategis dilakukan oleh, TPID disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi anggota;
5. dalam melakukan pengendalian inflasi, TPID dapat meminta bantuan kepada pihak lainnya; dan
6. penyampaian informasi dan/atau rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo dan Pimpinan Bank Indonesia Solo dengan tembusan kepada instansi terkait/pihak terkait, dilakukan oleh TPID;

D Data dan informasi yang dipergunakan dalam pembahasan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Dokumen pendukungnya bersifat terbatas

E. Bentuk-bentuk pengendalian harga antara lain operasi pasar, perbaikan distribusi, moral suasion, dan pembentukan ekspektasi masyarakat.

F. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, TPID yaitu Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, ♀



WARDOYO WIJAYA

9